

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- Adolf, Huala. *Perjanjian Penanaman Modal Dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. 2. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Badruzaman, Mariam Darius. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Proyek Penulisan Karya Ilmiah Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan PT Alumni, Bandung, 1997.
- Djajaatmadja, Bambang Iriana. *Hukum Telekomunikasi Dan Peranannya Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1997/1998.
- Dumairy. *Perekonomian Indonesia*. Cet. 5. Jakarta: Erlangga, 1996.
- Gautama, Sudargo. *Indonesia dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional*. Ed. 3. Cet. 1. Bandung: PT Alumni, 2002.
- Haming, Murdifin dan Salim Basalamah. *Studi Kelayakan Investasi, Proyek, dan Bisnis*. Jakarta: PPM, 2003.
- Harjono, Dhaniswara K. *Hukum Penanaman Modal*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Lubis, Todung Mulya. *Catatan Hukum Todung Mulya Lubis*. Jakarta: Kompas, 2007.
- Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*. Cet. 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mamudji, Sri. *Et. al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Panjaitan, Hulman. *Hukum Penanaman Modal Asing*. Cet. 1. Jakarta: Ind-Hill Co, 2003.
- Pramono, Nindyo. *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*. Bandung: Citra Aditya, 2006.

Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-Azas Hukum Tata Negara Di Indonesia*. Cet. 6. Jakarta: PT Dian Rakyat, 1989.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Alumni, 1986.

Sihombing, Jonker. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Cet. 1. Bandung: PT Alumni, 2009.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan (Dikembangkan dari Perkuliahan Prof. Dr. A. Hamid S. Attamimi, S.H.)*. Cet. 5. Yogyakarta: Kanisius (Anggota IKAPI), 2007.

Sutrisno, Budi dan Salim HS. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

### **Harian**

Taba, Abdul Salam. "Melindungi Menara, Mengurangi Asing". *Sinar Harapan*. (26 Februari 2008). Hlm. 4.

### **Internet**

<http://en.wikipedia.org>. Diunduh 8 Juni 2010.

<http://icsid.worldbank.org>. Diunduh 11 Juni 2010.

<http://kamushukum.com>. Diunduh 4 Juni 2010.

<http://www.miga.org>. Diunduh 8 Juni 2010.

[http://www.postel.go.id/content/ID/regulasi/standardisasi/kepmen/permen\\_nomor\\_02-2008.pdf](http://www.postel.go.id/content/ID/regulasi/standardisasi/kepmen/permen_nomor_02-2008.pdf). Diunduh 2 Februari 2010.

Investor Daily. SKB Menara Bersama Akhirnya Terbit.

<http://www.indonesiantower.com/content/skb-menara-bersama-akhirnya-terbit>. Diunduh 10 Januari 2010.

Owi. Aturan DNI Final Menara Telekomunikasi Tertutup Bagi Asing.

<http://www.riaupos.com/berita.php?act=full&id=4071&kat=1>. Diunduh 19 April 2010

Palealu, Albert. Peraturan Bersama Tentang Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.

[http://www.haeyes.com/uploadedfiles/library/file\\_04563420090620.pdf](http://www.haeyes.com/uploadedfiles/library/file_04563420090620.pdf). Diunduh 7 Juni 2010.

Pitoyo, Arif. Ada asing di menara telekomunikasi.  
<http://web.bisnis.com/artikel/2id2844.html>. Diunduh 19 April 2010.

Purnomo, Bambang. Asas Legalitas Dalam Doktrin Hukum Indonesia. <http://wahyudidjafar.wordpress.com/2008/07/25/ketika-legalitas-memasuki-indonesia/>. Diunduh 9 Juni 2010.

Ramdani, Dedi. Pengertian Hukum Dan Hukum Ekonomi.  
<http://joeniarianto.files.wordpress.com/2008/10/sumber-sumber-hukum-compatibility-mode.pdf>. Diunduh 5 Februari 2010.

Runiasari, Kartika. Perpres Daftar Negatif Investigasi (DNI) Terbit.  
<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2010/06/09/56530/Perpres-Daftar-Negatif-Investigasi-DNI-Terbit>. Diunduh 19 Juni 2010.

Setyawan, Hendra. Strategi Dalam Menarik Penanaman Modal Asing (Investasi Asing) Untuk Pembangunan Ekonomi Di Indonesia.  
<http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/03/strategi-dalam-menarik-penanaman-modal-asing-investasi-asing-untuk-pembangunan-ekonomi-di-indonesia/>. Diunduh 20 Maret 2010.

Usihen, Mien. Peraturan Menteri Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.  
<http://www.legalitas.org/?q=peraturan-menteri-menurut-undang-undang-nomor-10-tahun-2004-tentang-pembentukan-peraturan-perundang-undangan>. Diunduh 10 April 2010.

Wijaya, Agoeng dan Nalia Rifika. BKPM Tetap Minta Menara Telekomunikasi Terbuka untuk Asing.  
<http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2010/03/17/brk,20100317-233098,id.html>. Diunduh 19 April 2010.

## **Jurnal**

Malik, Camelia. "Jaminan Kepastian Hukum Dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia". Hukum Bisnis Universitas Indonesia (2007). Vol. 26 No. 4.

## **Kuliah**

Mamudji, Sri. "Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum". Bahan perkuliahan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia disampaikan pada Kuliah Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum, Depok, 17 Februari 2009.

Mamudji, Sri. "Penulisan Karya Tulis Ilmiah". Bahan perkuliahan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

disampaikan pada Kuliah Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum, Depok, 17 April 2009.

Simatupang, Dian Puji N. “Bahasa Indonesia dalam Penelitian Hukum)”. Bahan perkuliahan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia disampaikan pada Kuliah Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum, Depok, 13 Maret 2009.

Simatupang, Dian Puji N. “Proposal Penelitian (Tesis)”. Bahan perkuliahan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia disampaikan pada Kuliah Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum, Depok, 13 Maret 2009.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*.

Indonesia. *Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan*, UU No. 10 tahun 2004, LN No. 53 Tahun 2004, TLN No. 4389.

Indonesia. *Undang-Undang Penanaman Modal*, UU No. 25 tahun 2007, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724.

Indonesia. *Undang-Undang Penanaman Modal Asing*, UU No. 1 Tahun 1967, LN No. 1 Tahun 1967, TLN No. 2818.

Indonesia. *Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara Dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal*, UU No. 5 tahun 1968, LN No. 32 Tahun 1968, TLN No. 2852.

Indonesia. *Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 5 tahun 1986, LN No. 77 Tahun 1986.

Indonesia. *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

Indonesia. *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 9 tahun 2004, LN No. 35 Tahun 2004, TLN No. 4380.

Indonesia. *Undang-Undang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing*, UU No. 11 Tahun 1970, LN No. 46 Tahun 1970, TLN No. 2943.

Indonesia. *Undang-Undang Telekomunikasi*, UU No. 36 tahun 1999, LN No. 154 Tahun 1999, TLN No. 3881.

- Indonesia. *Peraturan Presiden Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal*, PerPres No. 77 tahun 2007.
- Indonesia. *Peraturan Presiden Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal*, PerPres No. 111 tahun 2007.
- Indonesia. *Peraturan Presiden Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal*, PerPres No. 36 tahun 2010.
- Indonesia. *Peraturan Presiden Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal*, PerPres No. 76 tahun 2007.
- Indonesia. *Peraturan Presiden Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia*, PerPres No. 9 tahun 2005.
- Indonesia. *Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi*, Permenkominfo No. 02/PER/M.KOMINFO/3/2008.
- Indonesia. *Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi*, Peraturan Bersama No. 18 tahun 2009, No. 07/PRT/M/2009, No. 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, dan No. 3/P/2009.